

**STUDI KELEMBAGAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA  
PADANG**

**OLEH**

**EKA PUSPITA SARI  
03 115 012**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

## STUDI KELEMBAGAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PADANG

### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Studi Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kota Padang” ini telah dilaksanakan pada bulan November-Desember 2008. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kelembagaan balai penyuluhan pertanian dan mengidentifikasi permasalahan petani dan kebutuhan penyuluhan pertanian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pengambilan sampel dilakukan pada petani yang ada di kelompok tani Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan kunci dan kuisioner kepada petani. Data dianalisa dengan deskriptif kualitatif terhadap kedua tujuan tersebut.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa BPP Nanggalo merupakan BPP model di Kota Padang, karena BPP Nanggalo ini memiliki Standarisasi BPP model. Dalam kegiatan penyuluhan BPP ini melaksanakannya melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Permasalahan yang dihadapi oleh petani berdasarkan wawancara dengan petani adalah Pemupukan dan Pengairan dimana petani susah mendapatkan pupuk dan air irigasi. Namun sesuai dengan Program yang didapat sangat berbeda permasalahan yang dihadapi petani, dan BPP tidak mengetahui kebutuhan petani pada saat itu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa BPP belum bisa mengetahui apa keinginan dan kebutuhan dari petani. Maka BPP belum bekerja maksimal yang sesuai dengan UU No 16 Tahun 2006 yang didalamnya berisikan tugas dan fungsi dari BPP.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Pembangunan pertanian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usaha tani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian, terutama sumber daya manusia petani adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian salah satu sarana kebijaksanaan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Menyadari arti pentingnya penyuluhan dalam pembangunan pertanian maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis terutama melalui pendidikan non formal dibidang pertanian agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraannya (Departemen Pertanian, 2008)

Banyak pihak menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia pertanian, termasuk pembangunan kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian adalah faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap cerita keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Khususnya dalam upaya pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 dan penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa investasi dibidang penyuluhan pertanian memberikan tingkat pengembalian internal yang tinggi. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan pertanian merupakan komponen penting dalam keseluruhan aspek pembangunan pertanian (Mawardi, 2004).

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara persuasive-edukatif yang terutama dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar didukung oleh kegiatan pembangunan pertanian lainnya. Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu proses berkesinambungan untuk menyampaikan informasi serta teknologi yang berguna bagi petani dan keluarganya. Kegiatan ini diusahakan agar tidak menimbulkan ketergantungan antara petani dan penyuluh tetapi untuk menciptakan kemandirian petani dalam mengembangkan kelompok taninya. Selain penyuluhan pertanian keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku pembangunan khususnya petani. Sebagai pelaku pembangunan, petani diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha tani. Selama ini mereka didekati melalui pendekatan kelompok untuk diberdayakan. Secara teoritis pengembangan kelompok tani dilaksanakan dengan menumbuhkan kesadaran para petani, dimana keberadaan kelompok tani perlu dilakukan dari, oleh dan untuk petani. Pengembangan kelompok tani perlu dilaksanakan dengan nuansa partisipatif sehingga prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas serta kerja sama menjadi muatan-muatan baru dalam pemberdayaan petani (Departemen Pertanian, 2008).

Menurut Mardikanto (1991) kunci pentingnya penyuluhan dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam permodalan, pengetahuan, keterampilan maupun lemah dalam hal peralatan teknologi yang diterapkan. Disamping itu mereka juga seringkali lemah dalam hal semangatnya untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa praktek penyuluhan yang bertujuan untuk menawarkan atau memasarkan inovasi sampai dengan inovasi tersebut diadopsi oleh masyarakat, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam praktek kegiatan penyuluhan selalu menuntut kerja keras, kesabaran, memakan banyak waktu dan sangat melelahkan. Sehingga pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan kian menjadi kebutuhan banyak pihak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Studi Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BPP Nanggalo merupakan suatu lembaga yang berada pada tingkat kabupaten. Dalam mendirikan suatu lembaga, lembaga ini memiliki prinsip dan aturan dalam melaksanakan kegiatan. Sebelum pendirian BPP Nanggalo telah dibuat dan disepakati apa tujuan pendirian BPP, visi dan misi BPP, struktur organisasi, aturan dan prinsip dari BPP sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan atau program dari BPP. Struktur dari BPP ini telah di tentukan sesuai dengan tugasnya. Dengan struktur organisasi tersebut otomatis visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan akan berjalan dengan baik. Dalam perencanaan kegiatan atau program petani dilibatkan langsung dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan sesuai dengan program penyuluhan pertanian untuk memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan. Kegiatan penyuluhan pertanian akan dihadapkan pada kemampuan untuk mengolah tantangan, peluang, masalah dan kendala pada proses desiminasi teknologi yang disampaikan. Kesatuan arah, tujuan, dan cara mencapai tujuan yang terintegrasi dengan baik antara penyuluh pertanian, pelaku usaha dan lembaga pendukung penyuluhan akan mampu memberikan perbaikan-perbaikan mendasar ekonomi petani menuju terciptanya kesejahteraan keluarga petani. Dan pada tahun 2006 BPP Nanggalo diberikan penghargaan sebagai BPP Model di kota Padang. Dengan penghargaan tersebut diharapkan BPP Nanggalo dapat menjadi contoh kepada BPP lain di Kota Padang.
2. Kegiatan usaha tani padi yang dilakukan oleh petani sudah sesuai dengan ketentuan atau teori yang diinformasikan oleh penyuluh. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut masih ada juga ditemukan masalah yang terjadi dilapangan. Dalam kegiatan BPP telah merumuskan kegiatan yang akan dilakukannya dalam perencanaan kegiatan. Tetapi isi kegiatan dalam program yang dibuat BPP belum dapat mengatasi permasalahan petani. Maka BPP belum mampu menjawab kebutuhan petani, hal ini

## DAFTAR PUSTAKA

- [Anonimous].2000. *Metode Penyuluh Pertanian Partisipatif*. Balai Metodologi Informasi Pertanian Ciawi.Bogor.
- [Anonimous].2007. *UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan (SP3K) Telah disahkan oleh Komisi IV DPR-RI*. BadanPengembangan Sumber Daya Manusia.Jakarta.
- Arsad.2006. *Studi kelembagaan Pemasaran Padi di Pedesaan (Studi Kasus Usaha Tani di Nagari Perambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok*.Thesis.Pasca Sarjana. Unand. Padang.
- Awaluddinhalifah.2006. *Penyuluh Pertanian dalam Dimensi Islam*. ([www.google.com](http://www.google.com)). [5 januari 2008]
- Ban.A.W Van Den Ban dan H. Shawkins.2001. *Penyuluhan Pertanian*.Kanisius.Yogyakarta.
- Departemen Pertanian.2008. *Arah Pengembangan Penyuluhan Pertanian*.Sumatera Barat.
- Hasibuan,Malayu.S.P.2004.*Manajemen:Dasar,Pengertian dan Masalah*. P.T.Bumi Aksara.Jakarta.
- Helmi.1997. *Pengelolaan Irigasi dan SDA yang Berorientasi Efisiensi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani, Beberapa Pemikiran Tentang Penyesuaian Kelembagaan Petani*.PSI.Unand.Padang.
- Helmi, dkk.1998. *Penyesuaian Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Pemberdayaan Petani*.PS-SDALP Unand. Padang.
- Kamaruddin,AS dan Azis,Mansyur.2006..*Sistem Informasi Penyuluhan*.Sinar Tani(13 Desember 2006).Jakarta.
- Kartasapoetra,AG.1994. *Teknologi Penyuluh Pertanian*.Bina Aksara.Jakarta.
- Kartonegoro.Sentoso.1994. *Manajemen Organisasi*.Widyapres.Jakarta.
- Mardikanto, Totok.1991. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*.Penerbit Universitas Sebelas Maret.Surakarta.
- Mardikanto, Totok.1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*.Sebelas Maret University Press.Surakarta.